

DAFTAR PUSTAKA

- Suparno Wo Thekle, “Pemerintah Desa Dan Pemerintahan Desa,” *Dero.Desa.Id*, last modified 2022, accessed May 30, 2023, <https://dero.desa.id/index.php/artikel/2022/12/25/pemerintah-des-1>.
- Ummi Kalsum Siregar, 2017. “Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang”. *Program Studi Ilmu Administrasi Negara Administrasi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan*.
- Meiske Lantaka, Markus Kaunang, dan Johny P. Lengkong, ” Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara” (online), (jurnal baru.pdf, diunduh 13 July 2023).
- Ummi Kalsum Siregar, “Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang,” *Program Studi Ilmu Administrasi Negara Administrasi Pembangunan USU (2017): 2. Hal.3*
- Hasan basri, penuntun penyusun rencana penelitian dan penulisan skripsi, (jakarta: raja grafindo persada, 2001) hal. 43
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* (Bandung: Alafabeta). Hlm. 6

Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Sripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal.63

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13

Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Depok:PT Rajagrafindo Persada, hal. 2.

Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hal. 80.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), hal. 8.

Sakinah Nadir, 2013, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa*, *Jurnal Politik Profetik*, 1.1, hal 1–21.

Pratikno, 1991, *Perumusan Pola Hubungan Pusat Daerah Dalam Rangka Realisasi Otonomi Daerah*. Laporan Penelitian. Fak.Sospol Ugm. Yogyakarta

Widjaja,2003, *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.3

Widjaja,2003, *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.165

Sakinah Nadir, “No TitleOtonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa,” *Jurnal Politik Profetik* 1 (2013): hal.9.

Sakinah Nadir, 2013, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa* *Jurnal Politik Profetik*, *Jurnal Politik Profetik*, 1.1, hal.1-21

Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa*, *Jurnal Politik Profetik*. Hal. 1-21

Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal.35

- Abdul Ghafar Karim, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.45.
- AW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 65.
- Komaruddin Ahmad, Akuntansi Manajemen, Dasar-dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 165.
- Mathis and Jackson, Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 303.
- Maringan, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal.61.
- Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal.50.
- MEI Muhammad Hambali, SHI, “Agama Dan Pengertian Agama Dalam Berbagai Bentuknya” (n.d.), [https://fib.unair.ac.id/jdownloads/Materi Kuliah/MKWU/Materi Agama Islam/agama_dan_pengertian_agama_dalam_berbagai_bentuknya.ppt](https://fib.unair.ac.id/jdownloads/Materi%20Kuliah/MKWU/Materi%20Agama%20Islam/agama_dan_pengertian_agama_dalam_berbagai_bentuknya.ppt).
- Darmini Roza & Larensius Arliman S. Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Padjajaran, 2017, Hal. 610
- Huda, M. M., Suwandi, S., dan Rofiq, A, 2022, Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum

- Soerjono Soekanto. In *Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, hal. 115-134.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 8
- JAPB : Vol. 1, No. 1, April 2018, hal. 253-254.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, hal. 82.
- Rita Eka Izzaty, 1967, Budi Astuti, and Nur Cholimah, *Tinjauan Tentang Efektifitas Hukum*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6 (11), hal. 5–24.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, hal. 82
- Rita Eka Izzaty, 1967, Budi Astuti, and Nur Cholimah, *Tinjauan Tentang Efektifitas Hukum*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6 (11), hal. 5–24
- Sudirman, Muh. Sesse, 2013, *Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 2.
- Friedman, L. M., 2009, *Sistem hukum perspektif ilmu social*, Bandung: Nusa Media
- Theresia Pratiwiningsih, *Nilai Kearifan Ungkapan Budaya Jawa “Rukun Agawe Santosa” Dalam Gagasan Pemikiran Emmanuel Levinas*, *Jurnal Ilmu Budaya*, 8.2, 216–24, 2020
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 61
- Nugroho, S, 2013, “Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan”. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Hal. 258-259.
- Hararap, Ducan, 2001, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: Quantum, Hal. 3-4.

Proyudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Grealia Indonesia ,1992) ,hlm.86

Drajad Teguh Santosa , Wawancara Pribadi, Kepala Desa Gedongan 22 Desember 2023 Pukul 14.35 Wib.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (2014)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Desa (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.35.

Lihat penjelasan pasal 61 huruf (a) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tri Rohmadi, Ketua BPD Desa Gedongan, Wawancara Pribadi, Karanganyar, 26 Oktober, Pukul 19:15 WIB

Drajad Teguh Santoso, Kepala Desa Gedongan, Wawancara Pribadi, Karanganyar, 22 November 2023, Pukul 11:00 WIB

Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 28 July 2023 pukul 13.58.

Annisa Medina Sari, “Pengertian Otonomi Daerah,” *Fahum.Umsu.Ac.Id*, last modified 2023, accessed August 8, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-otonomi-daerah/>.

Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/Hukum/Efektivitas-Hukum-2> di akses pada tanggal 28 July 2023 pukul 13:35.

“Asal Usul Sejarah Desa Gedongan,” *Tribun Solo* (n.d.).

N Widyarningsih, "Bab IV Tinjauan Umum Kalurahan Gedongan," *sinus.ac.id* (2011),

https://eprints.sinus.ac.id/326/4/002C2011SSI_06.4.00034_BAB_IV.new.pdf.

Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia Halaman 1, Kompasiana.com.

<https://www.kompasiana.com/naniyayin/628c50ecbb44866a5861f822/penegakan-hukum-yang-berkeadilan-di-indonesia> diakses pada 10 November 2023 pukul 19.30.

Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat.

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat diakses pada 23 November 2023 pukul 20.00

Sarana dan Prasarana: Definisi, Fungsi, Ruang Lingkup, serta Contohnya.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/24/142001469/sarana-dan-prasarana-definisi-fungsi-ruang-lingkup-serta-contohnya> diakses pada 24 November 2023 pukul 15.22.15

Info Desa <https://risehtunong.blogspot.com/2020/01/apa-saja-pembiayaan-bpd-dalam-apbdes.html> diakses pada 21 Januari 2024